



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM BAIHAQI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
3. NHK : 643347

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/180 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
2. Tanah Seluas 518 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/36 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
4. Tanah Seluas 1.103 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 1.253 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 305.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.650.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 123.678.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.020.328.000
III. HUTANG	Rp.	211.993.624
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.808.334.376

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.